

# Kebijakan Pembangunan Nasional: dari Pertumbuhan (*Growth*) Menuju Kebahagiaan (*Happiness*)

Muhammad Ghafur Wibowo

*Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Email: gus\_fur2001@yahoo.com*

**Abstract.** This study aims to demonstrate the reorientation toward the national development policy of quantitative macro size (growth) towards a more qualitative measure (happiness). The test results of multiple linear regression on the variable value of public happiness index in each province of Indonesia with variable poverty, income inequality and income per capita shows quite interesting results. Apparently, only the poverty variable has significant negative effect on the happiness index. This means that poor people in Indonesia who have limitations in various aspects of life feel the lowest levels of happiness. Another interesting finding is that income and the income gap does not significantly influence the level of happiness of society. Therefore, the government needs to pay more attention to various aspects such as the quality of family life, social and various other aspects.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan adanya reorientasi arah kebijakan pembangunan nasional dari ukuran makro kuantitatif (pertumbuhan) menuju ukuran yang lebih kualitatif (kebahagiaan). Hasil pengujian regresi linier berganda terhadap variabel nilai indeks kebahagiaan masyarakat di tiap-tiap provinsi Indonesia dengan variabel kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pendapatan per kapita menunjukkan hasil yang cukup menarik. Ternyata, hanya variabel kemiskinan yang berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks kebahagiaan. Artinya penduduk miskin di Indonesia yang mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan merasakan tingkat kebahagiaan yang paling rendah. Temuan lain yang menarik adalah bahwa pendapatan dan kesenjangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap berbagai aspek seperti kualitas kehidupan keluarga, sosial dan berbagai aspek lainnya.

**Kata Kunci:** *kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, indeks kebahagiaan*

## Pendahuluan

Pada awal Februari 2016 ini, Pemerintah Negara Uni Emirat Arab (UEA) mengeluarkan kebijakan pembentukan 2 kementerian baru, yaitu Kementerian Kebahagiaan (Minister of State for Happiness) dan Kementerian Toleransi (Minister of State for Tolerance). Kementerian ini diklaim merupakan satu-satunya di dunia yang secara khusus mengurus masalah kebahagiaan yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan negara guna terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik dan memuaskan masyarakat.<sup>1</sup> Kebahagiaan merupakan suatu pendekatan terbaru dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa, melewati ukuran-ukuran kuantitatif yang selama ini masih terus digunakan seperti pendapatan, inflasi, kemiskinan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Jika merujuk pada pembukaan UUD 1945 tentang salah satu tujuan negara adalah “memajukan kesejahteraan umum”, maka orientasi pembangunan yang dijalankan oleh negara selalu tertuju pada ukuran-ukuran kuantitatif ekonomi makro. Beberapa ukuran yang sering menjadi patokan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah pengangguran, defisit anggaran negara dan lain sebagainya. Berbagai hal tersebut selalu dipertimbangkan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak ada yang salah dengan hal tersebut karena memang tugas pemerintah dalam bidang ekonomi negara adalah melakukan atau memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta (non pemerintah).<sup>3</sup> Dalam perspektif ekonomi Islam-pun difahami bahwa tugas utama dari pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat serta memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>4</sup> Hanya saja, orientasi pembangunan yang terfokus pada ukuran keuangan/makro ekonomi semata sering terjebak pada masalah ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>1</sup> Dikutip dari [www.independent.co.uk/news/world/middle-east/united-arab-emirates-creates-happiness-minister-for-social-good-and-satisfaction-a6862996.html](http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/united-arab-emirates-creates-happiness-minister-for-social-good-and-satisfaction-a6862996.html) tanggal 9 Februari 2016, diakses 17 February 2016.

<sup>2</sup> Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, and Richard Startz, *Macroeconomics*, 7th ed. (New York: McGraw Hill, 1998), hlm. 20-37.

<sup>3</sup> Musgrave, R.A. & Musgrave, P.B. *Public Finance in Theory and Practice* (Singapore: McGraw Hill, 1987), hlm. 5.

<sup>4</sup> Sabahuddin Azmi. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*. (New Delhi: Goodword Books, 2002), hlm. 42.

Tulisan ini merupakan hasil riset empiris kuantitatif yang menguji adanya pergeseran arah kebijakan pembangunan nasional Indonesia tahun 2014 secara lintas provinsi. Arah yang dimaksud adalah target capaian pembangunan yang pada mulanya hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan berbagai indikator kuantitatif lainnya, menjadi indikator kualitatif baru yang menunjukkan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

### Kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan yang dimaksudkan oleh negara selama ini diidentikkan dengan pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) yang menghitung keseluruhan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara pada satu tahun tertentu.<sup>5</sup> Semakin tinggi nilai PDB suatu negara pada tiap tahunnya maka hal itu menunjukkan semakin tinggi produktifikasi negara tersebut yang akan diiringi dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan yang dimaksud di sini adalah pendapatan per kapita masyarakat yang dihitung dari PDB dibagi dengan total jumlah penduduk suatu negara.

Tabel 1.  
Pendapatan Per Kapita Negara ASEAN 2013-2014 (US\$)

Negara	2013	2014
Cambodia	1.018	1.081
Brunei Darussalam	39.659	36.607
Indonesia	3.680	3.534
Malaysia	10.457	10.804
Myanmar	1.113	1.221
Philipina	2.791	2.865
Singapura	55.980	56.319
Thailand	5.670	5.445
Timor-Leste	4.164	3.638

Sumber: [www.statisticstimes.com](http://www.statisticstimes.com)

Tabel di atas menunjukkan bagaimana capaian pendapatan per kapita negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia. Tampak bahwa negara Singapura dan Brunei Darussalam sangat tinggi capaian pendapatan penduduknya dibanding negara lain seperti Indonesia,

<sup>5</sup> Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 27.

Philipina atau bahkan Myanmar. Setiap negara selalu berusaha untuk bisa meraih tingkat pendapatan yang tinggi dibanding negara lain, dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Namun, terdapat kelemahan mendasar konsep pendapatan per kapita ini, yaitu dinafikanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Pada kenyataannya pendapatan nasional yang tinggi tersebut terkadang hanya dikuasai oleh sebagian kecil penduduk suatu negara, sedangkan penduduk yang mayoritas hanya menerima sedikit saja pendapatannya.

Tingginya tingkat pendapatan perkapita suatu negara tidak selalu sejalan dengan pemerataan pendapatannya. Ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan tingginya indeks Gini (nilai 0-1) suatu negara. Nilai indeks Gini beberapa negara di ASEAN pada tahun 2012 adalah: Thailand (0,531); Singapura (0,473); Malaysia (0,462); Philipina (0,458); Indonesia (0,416); Vietnam (0,376).<sup>6</sup> Misalnya, Philipina yang nilai indeks Gini-nya lebih tinggi dari Indonesia berarti bahwa kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin di sana lebih parah dibanding Indonesia, padahal tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi di Indonesia. Indonesia berada pada posisi yang menengah dalam tingkat pemerataan pendapatan. Demikian pula Singapura yang tingkat pendapatannya sangat tinggi ternyata tingkat kesenjangan pendapatannya juga tinggi.

Ketidakpuasan atas pengukuran tingkat kesejahteraan itulah yang kemudian memunculkan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digagas oleh pemenang Nobel Ekonomi, Amartya Sen yang kemudian diadopsi oleh United Nations Development Program (UNDP) di tahun 1990 dengan diterbitkannya Human Development Report (HDR).<sup>7</sup> Pembangunan manusia dimaksudkan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia, yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. UNDP membuat pengukuran IPM dengan menggunakan beberapa ukuran berikut ini:

1. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup;

---

<sup>6</sup> Bambang Soedibyo, “*Sluggishness, Susceptibility, Imbalances, and Inequality of Indonesian Economy: Potential Crisis Around the End of 2015*”, (Makalah Seminar FEB UGM, 19 September 2015), hlm. 5-9.

<sup>7</sup> Elizabeth A. Stanton, *The Human Development Index: A History*, (Global Development and Environment Institute, Tufts University, February 2007), hlm. 3.

2. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya;
3. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal;
4. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Peringkat IPM Indonesia tahun 2013 tidak berubah dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada posisi 108 dari 187 negara. Kondisi ini lebih baik dari negara-negara anggota ASEAN lainnya yang menempati peringkat lebih rendah seperti Myanmar (150), Laos (139), Kamboja (136), Vietnam (121) dan Filipina (117), namun lebih buruk jika dibanding dengan Singapura (9), Brunei (30), Malaysia (62) dan Thailand (89).<sup>8</sup> Sampai saat ini IPM masih digunakan oleh berbagai negara untuk mengukur kinerja pembangunan suatu negara.

### **Kesejahteraan dalam Paradigma Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam didefinisikan oleh para ekonom muslim sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (MA. Manan & Kursyid Ahmad); dalam rangka mencapai *falab* (kebahagiaan di dunia dan akhirat) dengan mengorganisasikan sumber daya atas dasar kerjasama dan partisipasi (M. Akram Khan).<sup>9</sup> Tujuan ekonomi Islam bukan semata-mata mencapai kepuasan konsumen maupun memaksimalkan keuntungan produsen, namun bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya dan meminimalkan *mudarat*.

Satu istilah yang mewakili tujuan kehidupan dalam konteks ekonomi, yaitu *falab* yang bermakna kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Istilah *falab* berasal dari kata kerja dalam bahasa arab *aflaba-yuflibu*.<sup>10</sup> Tentu saja kesuksesan hidup yang ingin dicapai adalah kesuksesan di dunia dan akhirat sebagai wujud keimanan seorang muslim. Akram Khan (1994) merumuskan berbagai aspek (mikro dan

---

<sup>8</sup> <http://unic-jakarta.org/2014/07/25/laporan-pembangunan-manusia-2014-peluncuran-global-implikasi-lokal/> diakses 17 February 2016.

<sup>9</sup> Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, hlm. 2-3.

<sup>10</sup> Dalam beberapa ayat al-Qur'an disebut dengan istilah *muflihun* (QS 3: 104; 7:8; 9:8; 23:102; 24:51) dan *aflab* (QS 23:1; 91:9), lihat P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 2-3.



makro) dalam *falab* dan unsur-unsurnya (kelangsungan hidup; kebebasan berkeinginan; kekuatan dan harga diri).<sup>11</sup>

Tabel 2.  
Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam *Falab*

Unsur <i>Falab</i>	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan hidup	Kelangsungan hidup biologis: kesehatan, kebebasan keturunan dan sebagainya	Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	Kelangsungan hidup ekonomi: kepemilikan faktor produksi	Pengelolaan sumber daya alam dan penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk
	Kelangsungan hidup sosial: persaudaraan dan harmoni hubungan sosial	Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok
	Kelangsungan hidup politik: kebebasan dalam partisipasi politik	Jati diri dan kemandirian
Kebebasan berkeinginan	Terbebas dari kemiskinan	Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
	Kemandirian hidup	Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang
Kekuatan dan harga diri	Harga diri	Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang
	Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan	Kekuatan militer

Istilah lain dari tercapainya *falab* adalah kebaikan (*basanah/goodness*) atau kebahagiaan (*sa'adah/happiness*), baik pada saat kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:<sup>12</sup>

ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

<sup>11</sup> Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, hlm. 3.

<sup>12</sup> QS al-Baqarah [2]: 201)

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"

Guna mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat maka setiap muslim harus bisa menciptakan manfaat atau *maslahah*, yaitu segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.<sup>13</sup> *Maslahah* dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia meliputi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal/intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*). Kelima hal inilah yang dikenal sebagai tujuan dari ditetapkannya syariat Islam atau *maqasid asy-Syari'ah*.

### **Kebahagiaan dan Indeks Kebahagiaan**

Isu tentang kebahagiaan (*happiness*) dalam konteks kajian ekonomi telah lama dimulai sejak tahun 1990an, walaupun secara resmi indeks kebahagiaan (*World Happiness Index*) terbit pertama kali tahun 2012.<sup>14</sup> Charles Kenny, mengutip pendapat Bannock, Baxter and Davis, secara sederhana mendefinisikan kebahagiaan sebagai "kesenangan atau kepuasan yang dirasakan individu pada situasi tertentu, atau karena mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu."<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan merupakan sebuah penilaian yang sangat individual atau subyektif, namun secara umum memiliki penyebab yang relatif bisa ditelusuri kesamaanya.

Helliwell, Layard, & Sachs merumuskan sumber penyebab kebahagiaan, berdasarkan hasil penelitian selama puluhan tahun, yaitu sumber bawaan dan lingkungan yang keduanya menentukan kondisi utama kehidupan seseorang untuk mencapai kebahagiaan/kesengsaraan. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan diantaranya adalah pendapatan, pekerjaan, komunitas, nilai kehidupan serta agama. Adapun faktor internal yang dominan berpengaruh adalah kesehatan mental, kesehatan fisik, pengalaman keluarga, pendidikan serta jender dan usia.<sup>16</sup>

---

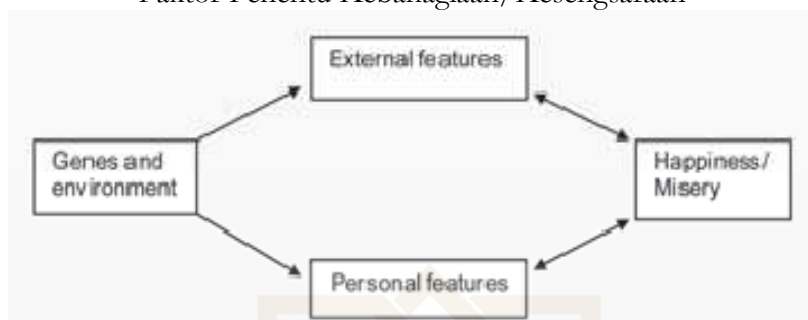
<sup>13</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, hlm. 5.

<sup>14</sup> John Helliwell, Richard Layard, and Jeffrey Sachs, *World Happiness Report*. (Columbia University Earth Institute, April 2, 2012).

<sup>15</sup> Charles Kenny, "Does Growth Cause Happiness, or Does Happiness Cause Growth?", (KYKLOS. Vol. 52 - 1999 - Fasc. 1. 3-26), hlm. 4.

<sup>16</sup> John Helliwell, Richard Layard, and Jeffrey Sachs, *World Happiness Report*., hlm. 59.

Gambar 1.  
Faktor Penentu Kebahagiaan/Kesengsaraan



Indikator pembangunan suatu negara yang diukur secara kuantitatif ekonomis seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan dan lainnya dirasakan belum mampu menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator ekonomi pada umumnya merupakan ukuran obyektif yang didasarkan pada ukuran finansial/uang (*monetary-based indicators*). Selama ini, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan standar yang sama (obyektif) maupun yang tidak sama (subyektif). Standar yang obyektif bisa berupa pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan dan sejenisnya, sedangkan standar yang subyektif adalah standar yang tidak sama untuk masing-masing individu, salah satunya indeks kebahagiaan.

Yang dimaksud dengan kebahagiaan di sini adalah segala sesuatu yang dirasakan dan dipersepsikan oleh setiap individu secara berbeda, oleh karenanya ukuran kebahagiaan menjadi subyektif. Indeks kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subyektif yang berguna untuk melengkapi indikator yang obyektif (bukan menggantikan). Komponen utama dalam pengukuran indeks kebahagiaan adalah tingkat kepuasan hidup individu (*life satisfaction*).<sup>17</sup>

Di Indonesia, pengukuran indeks kebahagiaan mulai dilakukan sejak tahun 2013 dengan mengadopsi berbagai referensi yang berkembang di luar negeri. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan

<sup>17</sup> BPS, *Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th. XVIII*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 5 Februari 2015), hlm. 1.

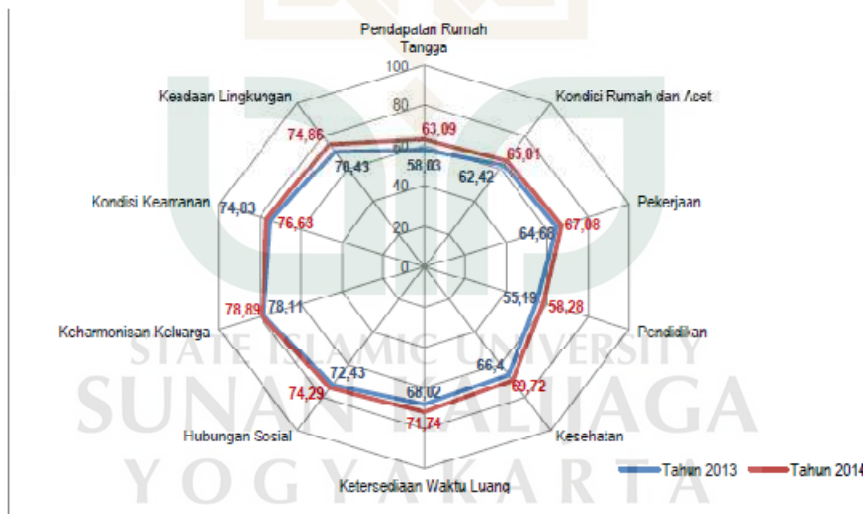


waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.<sup>18</sup>

### Indeks Kebahagiaan dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya

Pada konteks Indonesia, pengukuran Indeks Kebahagiaan baru dilaksanakan dua kali, yaitu tahun 2013 dan 2014 (hasil tahun 2015 belum tersedia). Secara umum terjadi peningkatan tingkat kebahagiaan masyarakat yang terlihat dari peningkatan nilai Indeks Kebahagiaan dari 65,11 di tahun 2013 menjadi 68,28 di tahun 2014 atau meningkat sebesar 3,17 poin.<sup>19</sup> Tingkat kepuasan masyarakat terhadap semua aspek kehidupan di tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami peningkatan, paling tinggi pada pendapatan rumah tangga (5,06 poin) dan terendah pada aspek keharmonisan keluarga (hanya 0,78 poin).

Gambar 1.  
Tingkat Kepuasan Hidup terhadap 10 aspek Kehidupan, 2013 dan 2014



Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap keharmonisan keluarga adalah paling tinggi pada tahun 2014 dan 2013 dibanding aspek yang lain, yaitu 78,89 dan 78,11. Adapun tingkat

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 2.

kepuasan pada aspek pendidikan adalah yang paling rendah pada kedua tahun amatan, yaitu hanya 58,28 dan 55,19. Aspek keamanan dirasakan masih menjadi masalah yang paling besar dialami masyarakat, terlihat bahwa dari tahun 2013 ke 2014 terjadi penurunan tingkat kepuasan masyarakat. Tentunya ini menjadi tantangan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, jangan hanya mengejar peningkatan pendapatan, namun keamanan juga harus menjadi prioritas.

Tabel 3.  
Tingkat Kepuasan Hidup terhadap 10 aspek Kehidupan, 2013 dan 2014

Aspek	2013	2014	Perubahan
1) kesehatan	66,40	69,72	3,32
2) pendidikan	55,19	58,28	3,09
3) pekerjaan	64,68	67,08	2,40
4) pendapatan rumah tangga	58,03	63,09	5,06
5) keharmonisan keluarga	78,11	78,89	0,78
6) ketersediaan waktu luang	68,02	71,74	3,72
7) hubungan sosial	72,43	74,29	1,86
8) kondisi rumah dan aset	62,42	65,01	2,59
9) keadaan lingkungan	70,43	74,85	4,42
10) kondisi keamanan	76,63	74,83	-1,80

Apabila dirinci menurut provinsi, maka 3 provinsi yang meraih indeks kebahagiaan tertinggi (2014) adalah Kepulauan Riau; Maluku dan Kalimantan Timur. Sedangkan 3 provinsi terendah yang meraih indeks kebahagiaan adalah Sumatera Barat; Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Ternyata, penduduk provinsi yang pendapatan per kapitanya paling tinggi (DKI Jakarta), tingkat kebahagiaan yang dirasakan tidak terlalu tinggi, hanya berada pada posisi 14, Riau yang dari sisi pendapatan berada pada urutan ke-3, tingkat kebahagiaannya ada pada posisi 15. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tingginya pendapatan tidak menjamin kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 4.  
Capaian Indeks Kebahagiaan<sup>20</sup> Dibandingkan dengan Rangkings  
Pendapatan Per Kapita  
Dirinci Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Indeks	Rangkings Pendapatan	No	Provinsi	Indeks	Rangkings Pendapatan
1.	Kepri	72,42	4	18	Bali	68,46	11
2.	Maluku	72,12	31	19	Babel	68,45	7
3.	Kaltim	71,45	2		<b>Indonesia</b>	<b>68,28</b>	-
4.	Jambi	71,1	6	20	Banten	68,24	13
5.	Sulut	70,79	16	21	Kalbar	67,97	23
6.	DIY	70,77	26	22	Lampung	67,92	22
7.	Malut	70,55	30	23	Sulteng	67,92	19
8.	Papua Barat	70,45	5	24	Sulbar	67,86	28
9.	Kalsel	70,11	17	25	Jateng	67,81	24
10.	Kalteng	70,01	14	26	Sumsel	67,76	10
11.	Sulsel	69,8	15	27	Jabar	67,66	21
12.	NTB	69,28	32	28	Sumut	67,65	12
13.	Gorontalo	69,28	29	29	Aceh	67,48	25
14.	DKI Jakarta	69,21	1	30	Bengkulu	67,43	27
15.	Riau	68,85	3	31	Sumbar	66,79	18
16.	Jatim	68,7	8	32	NTT	66,22	33
17.	Sulteng	68,66	19	33	Papua	60,97	9

Guna memperkuat dugaan di atas, maka menarik untuk dilakukan pengujian statistik tentang ada tidaknya pengaruh tingkat pendapatan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan data tahun 2014 yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dengan variabel kebahagiaan (*happiness*) yang diduga dipengaruhi oleh variabel kemiskinan (*poverty*), indeks Gini (*gini*) dan pendapatan per kapita (*gdp.cap*). Tambahan variabel kemiskinan dan indeks Gini yang menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan di suatu wilayah digunakan untuk kemungkinan variabel kontras atas tingkat pendapatan. Data yang diolah diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015.

<sup>20</sup> BPS Jawa Barat, *Berita Resmi Statistik No. 13/02/32/Th. XVII*, (Bandung: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 5 Februari 2015), hlm. 5.

Tabel 5.  
Output Olah Data Statistik Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	70,499	2,926		24,093	,000
	poverty	-,122	,063	-,351	-1,923	,064
	gini	-1,735	7,944	-,038	-,218	,829
	gdp.cap	,009	,011	,149	,804	,428

a. Dependent Variable: happiness

Secara statistik, suatu variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan jika nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,1 (dengan  $\alpha = 10\%$ ). Mengacu pada hasil pengolahan data di atas maka hanya variabel kemiskinan (*poverty*) saja yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kebahagiaan masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia. Orang miskin tentu saja mengalami kekurangan dalam berbagai hal, karena menurut Badan Pusat Statistik, seseorang dikatakan miskin jika penghasilan setiap bulan minimal mencapai Rp331.000,-<sup>21</sup> artinya, jika dalam satu keluarga terdiri dari 4 orang (bapak, ibu dan 2 anak) maka keluarga ini dikatakan tidak miskin jika total pendapatan per bulan sebesar Rp1.324.000,-. Tentu saja jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan ukuran kebutuhan hidup layak masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup layak saja terasa sulit apalagi kehidupan yang membahagiakan.

Memang harus diakui, ukuran kemiskinan yang digunakan pemerintah Indonesia relatif rendah sehingga penduduk yang miskin sudah dapat dipastikan akan kekurangan berbagai hal, termasuk pangan, sandang dan papan secara layak. Kondisi inilah yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kepuasan hidupnya yang kemudian berdampak pada tingkat kebahagiaannya. Secara statistik diketahui bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap tingkat kebahagiaan, artinya semakin miskin seseorang maka dia semakin tidak bahagia. Namun kondisi ini tidak berlaku sebaliknya pada tingkat

<sup>21</sup> BPS, *Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th. XVIII*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 15 September 2015), hlm. 4.

pendapatan per kapita (*gdp.cap*) yang secara statistik ternyata tidak mampu mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang. Artinya, belum tentu penduduk dengan pendapatan yang tinggi akan secara otomatis bahagia.

Mengacu pada data dari BPS, dari 10 aspek kehidupan yang ditanyakan, masyarakat Indonesia menyebutkan bahwa pendidikan merupakan aspek yang paling rendah tingkat kepuasannya. Hal ini bisa jadi disebabkan karena mahalannya biaya pendidikan serta kualitas yang belum merata antardaerah/wilayah. Selain pendidikan, aspek lain yang kurang memberikan kepuasan adalah pendapatan dan pekerjaan yang kedua hal ini terkait satu sama lain. Pekerjaan yang dimaksud tidak hanya dilihat dari besaran pendapatan namun juga dari situasi kerja, keamanan, kenyamanan dan berbagai hal lainnya.

Variabel kesenjangan pendapatan (*gini ratio*) ternyata secara statistik tidak signifikan berpengaruh pada indeks kebahagiaan. Pendapatan masyarakat di kota (besar maupun kecil) relatif lebih tinggi dari masyarakat desa, namun tentu saja biaya hidup mereka juga tinggi, tingkat kompetisi hidup dan budaya juga bisa membuat mereka tidak bahagia. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, kesenjangan pendapatan yang terjadi tidak secara langsung mempengaruhi tingkat kebahagiaan. Namun demikian, pemerintah tetap harus berusaha mengurangi adanya kesenjangan tersebut agar tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Dari berbagai hasil penelitian di dunia, kebahagiaan punya hubungan yang positif dengan tingkat pendapatan; tingkat kebahagiaan orang kaya lebih tinggi dari kebahagiaan orang miskin.<sup>22</sup> Namun demikian, pada titik tingkat pendapatan tertentu, kebahagiaan akan sangat dipengaruhi oleh hal-hal selain materi dan uang. Keamanan, kenyamanan, situasi keluarga dan tempat kerja merupakan faktor-faktor yang lebih dominan mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Artinya, pada saat masyarakat pada tingkat pendapatan yang rendah (*low income society*), maka pendapatan menjadi faktor yang sangat dominan mempengaruhi kebahagiaan. Hal ini berbeda pada masyarakat yang berpendapatan menengah dan tinggi (*middle and high income society*), maka

---

<sup>22</sup> Helen Johns And Paul Ormerod, *Happiness, Economics and Public Policy*, (London: The Institute of Economic Affairs 2 Lord North Street Westminster, 2007), hlm. 28-29.



faktor-faktor non-materi akan lebih mempengaruhi kebahagiaan mereka.<sup>23</sup>

Apabila dikaitkan dengan prioritas kebijakan, tentu pemerintah harus memiliki pilihan kebijakan yang akan diterapkan pada kondisi masyarakat yang berbeda. Pembangunan ekonomi di daerah pedesaan dan daerah tertinggal perlu difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur yang memadai, lapangan pekerjaan yang mampu menyerap sumberdaya manusia lokal serta peningkatan potensi kewirausahaan daerah. Prioritas pembangunan ini bukan berarti mengabaikan aspek-aspek kenyamanan, keamanan, keharmonisan dan berbagai ukuran kualitatif lain yang lebih diprioritaskan pada masyarakat berpenghasilan menengah dan atas.

Dalam pandangan ekonomi Islam, orientasi pembangunan harus juga berfokus pada pemerataan pendapatan/kesejahteraan, jangan hanya terpusat pada satu atau dua sekitar daerah atau pulau sehingga menimbulkan kekecewaan dan kecemburuan bagi daerah yang lain. Allah SWT mengingatkan:<sup>24</sup>

... كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ...

...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...

Dalam konteks pribadi, ibadah zakat yang diwajibkan oleh agama dapat berfungsi sebagai sarana distribusi pendapatan dari muzaki ke mustahik.<sup>25</sup> Dalam konteks bernegara, maka peran pemerintah perlu lebih memprioritaskan pembangunan kepada masyarakat yang masih rendah kesejahteraannya. Meningkatnya kesejahteraan dari sisi materi dan pemenuhan berbagai kebutuhan pokok masyarakat diyakini akan meningkatkan kebahagiaan yang dirasakan, sebagai sebuah ukuran baru keberhasilan pembangunan ekonomi. Mengutip pendapat al-Ghazali, kesejahteraan dan kebahagiaan akan tercapai apabila berbagai kebutuhan materi dan ruhani terpenuhi secara seimbang.<sup>26</sup> Untuk itulah kebijakan pembangunan nasional harus selalu diorientasikan menuju ke

---

<sup>23</sup> Shigehiro Oishi, Selin Kesebir, Ed Diener, "Income Inequality and Happiness", (Psychological Science 22(9) 1095-1100, 2011), hlm. 1099.

<sup>24</sup> QS. Al-Hasyr [59]: 7.

<sup>25</sup> Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, hlm. 33.

<sup>26</sup> Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Justicia Islamica*, Vol 11, No 1 (2014), hlm. 36.

sana. Menurut Ibnu Khaldun, itulah tugas dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut.<sup>27</sup>

## Penutup

Orientasi arah kebijakan pembangunan nasional Indonesia mulai mengalami pergeseran dalam beberapa tahun terakhir. Ukuran kesejahteraan dalam konteks ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran, utang luar negeri dan lain sebagainya mulai bergeser dan dilengkapi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/Human Development Index). Pengukuran kesejahteraan masyarakat yang lebih kualitatif terbaru yang dikenalkan adalah indeks kebahagiaan (*Happiness Index*) yang juga mulai diterapkan di berbagai negara.

Hasil pengujian regresi linier berganda terhadap variabel nilai indeks kebahagiaan masyarakat di tiap-tiap provinsi Indonesia dengan variabel kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pendapatan per kapita menunjukkan hasil yang cukup menarik. Ternyata, hanya variabel kemiskinan yang berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks kebahagiaan. Artinya penduduk yang miskin di Indonesia yang mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan merasakan tingkat kebahagiaan yang paling rendah.

Temuan lain yang menarik adalah bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kebahagiaan. Demikian pula variabel kesenjangan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat juga tidak berdampak pada kebahagiaannya. Hal ini berarti bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia, kebahagiaan tidak semata-mata dicukupi dengan pemenuhan material semata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap berbagai aspek seperti kualitas kehidupan keluarga, sosial dan berbagai aspek lainnya.

## Daftar Pustaka

Aswad, "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun terhadap Pemikiran Ekonomi Modern", *Jurnal al-Fiker*, Vol.16 No. 2 (2012).

---

<sup>27</sup> Aswad, "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun terhadap Pemikiran Ekonomi Modern", *Jurnal al-Fiker*, Vol.16 No. 2 (2012).

- Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*. New Delhi: Goodword Books, 2002.
- BPS Jawa Barat, *Berita Resmi Statistik No. 13/02/32/Th. XVII*, Bandung: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 5 Februari 2015.
- BPS, *Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th. XVIII*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.
- BPS, *Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th. XVIII*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.
- BPS Jawa Barat, *Berita Resmi Statistik No. 13/02/32/Th. XVII*, Bandung: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2015.
- Dornbusch, Rudiger; Stanley Fischer, and Richard Startz, *Macroeconomics, 7th ed*. New York: McGraw Hill, 1998.
- Helliwell, John; Richard Layard, and Jeffrey Sachs, *World Happiness Report*. Columbia University Earth Institute, April 2, 2012.
- <http://unic-jakarta.org/2014/07/25/laporan-pembangunan-manusia-2014-peluncuran-global-implikasi-lokal/> diakses 17 February 2016.
- Huda, Nurul, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Johns, Helen And Paul Ormerod, *Happiness, Economics and Public Policy*, London: The Institute of Economic Affairs 2 Lord North Street Westminster, 2007.
- Kenny, Charles, "Does Growth Cause Happiness, or Does Happiness Cause Growth?", *KYKLOS*. Vol. 52 (1999).
- Musgrave, R.A. & Musgrave, P.B. *Public Finance in Theory and Practice*, Singapore: McGraw Hill, 1987.
- Oishi, Shigehiro; Selin Kesebir, Ed Diener, "Income Inequality and Happiness", *Psychological Science* 22(9) 1095-1100, 2011.
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Purwana, Agung Eko, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Justicia Islamica*, Vol 11, No 1 (2014).

Soedibyo, Bambang, “*Sluggishness, Susceptibility, Imbalances, and Inequality of Indonesian Economy: Potential Crisis Around the End of 2015*”, (Makalah Seminar FEB UGM, 19 September 2015).

Stanton, Elizabeth A., *The Human Development Index: A History*, Global Development and Environment Institute, Tufts University, February 2007.

Widarjono, Agus, *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.

[www.independent.co.uk/news/world/middle-east/united-arab-emirates-creates-happiness-minister-for-social-good-and-satisfaction-a6862996.html](http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/united-arab-emirates-creates-happiness-minister-for-social-good-and-satisfaction-a6862996.html) tanggal 9 Februari 2016, diakses 17 February 2016.

